



RENSTRA PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN CIANJUR	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur	7
2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur	8
2.2.1 Sumber Daya Manusia	8
2.2.2 Sarana dan Prasarana	11
2.2.3 Jenis Pelayanan.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur ...	27
2.4.1 Tantangan Pembangunan Kelautan, Perikanan dan Peternakan.....	27
2.4.2 Peluang Pembangunan Kelautan, Perikanan dan Peternakan.....	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	31
3.1.1 Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan ...	31
3.1.2 Permasalahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota.....	34
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	34
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian.....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	

Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan.....	44
4.2 Sasaran	44
4.3 Penyelarasan RENSTRA	46
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	51
5.2 Kebijakan	52
BAB VI PRORGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program	53
6.2 Rencana Kegiatan.....	54
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN CIANJUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
7.1 Indikator Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026	60
7.2 Indikator Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	62
BAB VIII PENUTUP	66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan keridhoan-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2021 - 2026.

Renstra Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur merupakan rencana pembangunan kelautan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Cianjur selama periode tahun 2021 - 2026, yang memuat arah kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sumber daya di Kabupaten Cianjur. Renstra ini sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan kelautan, perikanan, dan peternakan dan dasar pelaksanaan evaluasi kinerja selama lima tahun kedepan.

Kebijakan pembangunan dalam Renstra dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis dari Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur.

Rencana Strategis ini merupakan rencana strategis hasil penyelarasan dimana terdapat penyelarasan pada sasaran dan indikator sasaran, hal ini dimaksudkan untuk mempertajam ukuran keberhasilan dari target yang sudah ditetapkan.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Cianjur, Februari 2024

Kepala
Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan
Perikanan Kabupaten Cianjur



Andi Haryanto AP, M.Si
NIP. 19740310 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya. Renstra Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan kabupaten cianjur disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2021 – 2026, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Perencanaan pembangunan jangka menengah pada sektor kelautan perikanan dan peternakan di Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam Renstra merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan adanya interaksi yang harmonis antara 4 (empat) unsur, meliputi : (1) Pemerintah, yang berperan dalam menciptakan lingkungan sosial, politik dan hukum yang kondusif melalui kebijakan-kebijakan yang *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*, (2) Akademisi, yang berperan dalam pengembangan dan penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat melalui lembaga-lembaga penelitiannya, (3) Swasta/Pelaku Usaha, yang berperan dalam menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan (4) Masyarakat, yang berperan positif untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik.

Pembangunan sektor kelautan perikanan dan peternakan di Kabupaten Cianjur saat ini sangat penting dalam rangka mendorong perekonomian di Kabupaten Cianjur. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong diantaranya dilihat dari wilayah Kabupaten Cianjur yang secara geografis maupun klimatologis, merupakan daerah potensial bagi pengembangan kelautan perikanan dan peternakan. Selain itu, Kabupaten Cianjur memiliki potensi kelautan perikanan dan peternakan yang semakin berkembang, baik dari segi jumlah populasi maupun dari jumlah produksinya. Kondisi ini membuat Kabupaten Cianjur memiliki peranan penting bagi pengembangan agribisnis dan ekonomi regional, karena kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan asal ikan dan ternak serta daya serap tenaga kerja mulai dari sub sistem hulu, budidaya sampai hilir yang masih menjadi andalan.

Sektor kelautan, perikanan dan peternakan merupakan bidang yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan secara keseluruhan, sehingga apabila pembangunannya dilakukan secara terarah dan tepat sasaran, maka akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prospek pembangunan kelautan, perikanan dan peternakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi semakin baik seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat

kandungan gizi yang bersumber dari ikan dan ternak bagi kesehatan dan kecerdasan, serta semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika, makanan dan minuman yang berbahan dasar produk hasil biota perairan maupun dari produksi hasil peternakan.

Namun demikian, agar pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara berkelanjutan, perlu diupayakan perencanaan dan pengelolaan yang optimal secara terarah dan terpadu. Oleh karenanya, pengembangan kelautan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Cianjur hendaknya mampu mendayagunakan semua potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menanggulangi kondisi permasalahan, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan produksi, mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat, dan terjaganya lingkungan yang lestari. Masyarakat pun harus didorong untuk menerapkan teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan, sehingga mampu menjadi bagian dalam pengendalian kualitas lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam paradigma pembangunan yang berkelanjutan.

Kebutuhan perencanaan pembangunan kelautan, perikanan dan peternakan, baik dalam kerangka jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, sudah seharusnya disusun dalam konteks perencanaan pembangunan daerah secara *holistic* (menyeluruh), dalam kerangka sinergitas dan sinkronisasi pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Cianjur secara utuh. Salah satu kerangka perencanaan tersebut adalah rencana pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), yang menjadi dasar perencanaan tahunan dan juga merupakan skenario kebijakan pembangunan sektoral.

Dokumen ini menyajikan agenda utama sebagai implikasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam kerangka pengembangan sektor kelautan perikanan dan peternakan, di Kabupaten Cianjur, serta sebagaiantisipasi terhadap masalah dan kendala yang belum sepenuhnya dapat tertangani pada periode pembangunan tahun 2021 – 2026, namun dipandang akan mempengaruhi kinerja OPD dan sektor secara keseluruhan sebagai akibat dinamisasi lingkungan strategis regional, nasional, maupun global.

Dokumen Renstra yang disusun, dimaksudkan sebagai upaya menjamin keberlanjutan dan konsistensi skenario kebijakan pembangunan, sebagaimana tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dimanifestasikan dalam ketercapaian indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari disusunnya dokumen Renstra Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan kabupaten cianjur periode tahun 2021 – 2026 sebagai dokumen perencanaan formal OPD, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737];
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 57/ Permen KKP/2020 Tentang Perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan No 17/ Permen-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 259 /KPTS/RC.020 /M.05 /2020 Tentang Rencana Strategis Pertanian Thn 2020-2024
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jabar Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur no 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah no 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Caianjur;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan.
19. Kepmendagri No 050 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan kabupaten cianjur Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, acuan dan arahan bagi

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan di Kabupaten Cianjur selama kurun waktu tahun 2021 – 2026

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan adalah :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan perikanan dan peternakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur dan mendukung capaian visi, misi, program dan sasaran strategis Kepala Daerah yang telah ditetapkan;
2. Menyusun target sasaran pembangunan kelautan perikanan dan peternakan di Kabupaten Cianjur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
3. Menetapkan strategi, kebijakan dan program pembangunan kelautan perikanan dan peternakan di Kabupaten Cianjur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR

Menguraikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, Sumber Daya Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan kabupaten cianjur, Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan Tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan Tentang Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan, Perikanan dan Peternakan

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIANJUR

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang dan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Susunan Organisasi

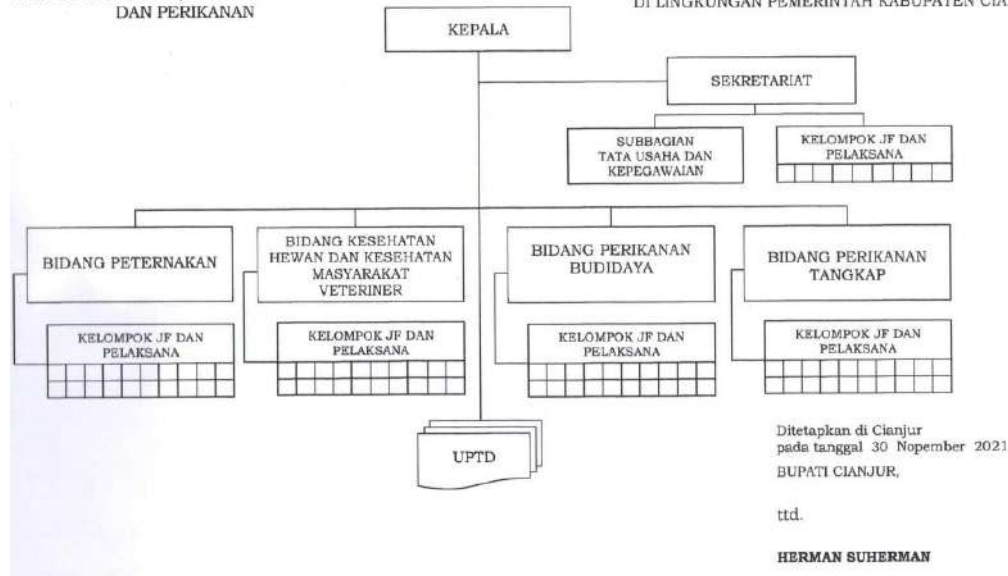
Sedangkan struktur organisasi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - Jf Perencanaan Ahli Muda;
 - Jf Analisis Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
 - Subag Tata Usaha dan Kepegawaian;

- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - Jf Pengelola Perikanan Tangkap Ahli muda;
 - Jf Pengelola Perikanan Tangkap Ahli muda;
 - Jf Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda;
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan;
 - Jf Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda;
 - Jf Analis Akuakultur Ahli Muda
 - Jf Analis Akuakultur Ahli Muda;
- e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - Jf Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
 - Jf Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
 - Jf Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Membawahkan
 - Jf Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
 - Jf Medik Veteriner Ahli Muda
 - Jf Medik Veteriner Ahli Muda
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Cianjur) , UPTD pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan terdiri dari;
 - Benih Ikan Air Tawar Cianjur;
 - Pengembangan Perikanan Perairan Umum Cianjur;
 - Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Utara;
 - Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Tengah;
 - Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Selatan;
 - Pengembangan Ternak Ruminansia Cianjur;
 - Rumah Potong Hewan Ruminansia Cianjur.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari;
 - Medik Veteriner;
 - Paramedik Veteriner;
 - Pengawas Bibit Ternak;
 - Pengawas Perikanan;
 - Penyuluh Perikanan.

MODEL 4
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 70 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, serta 26 orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubag, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, 8 (tujuh) orang Kepala UPTD dan 8 (tujuh) orang Kasubag TU UPTD dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Salah satunya dapat dilihat dari komposisi pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan berdasarkan pendidikan. Jumlah pegawai berlatar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, diharapkan dengan komposisi tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan kinerja organisasi. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, dari 55 orang pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 35 orang dan pegawai perempuan 20

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Berdasarkan JenisKelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	0	1
2.	Sekretariat	3	3	6
3.	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	2
4.	Bidang Peternakan	3	0	3
5.	Bidang Perikanan Budidaya	2	1	3
6.	Bidang Perikanan Tangkap	2	1	3
7.	UPTD	16	5	21
8.	Kelompok Jabatan Fungsional	5	9	14
Jumlah Total		33	20	53

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, tersebar dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Magister (S2) yang didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 33 orang. Rincian jumlah pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Cianjur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	1	1	-	-	6
3.	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	2	-	-	-	-	2
4.	Bidang Peternakan	-	1	-	1	1	-	-	3
5.	Bidang Perikanan Budidaya	-	-	2	1	-	-	-	3

5.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	1	2	-	-	-	3
6.	UPTD	-	1	16	1	3	-	-	21
7.	Fungsional	-	5	8	1	-	-	-	14
Jumlah Total		-	9	32	7	5	-	-	53

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022.

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur berdasarkan golongan/ruang, yaitu golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 37 orang, golongan II sebanyak 9 orang, dan golongan I sebanyak 0 orang. Rincian jumlah pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan berdasarkan Golongan/Ruang ditunjukkan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Berdasarkan Golongan/Ruang

UNIT KERJA	IV C	IV B	IV A	III D	III C	III B	III A	II D	II C	II B	II A	I D	I C	JUMLAH
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	6
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Bidang Peternakan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3
Bidang Perikanan Budidaya	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
Bidang Perikana Tangkap	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
UPTD	-	-	1	11	4	2	2	-	-	1	-	-	-	21
Fungsional	-	-	4	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	14
Jumlah Total	1	1	9	20	9	3	3	1	4	1	1	0	0	53

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur adalah gedung kantor sebanyak 1 unit, rumah dinas sebanyak 10 unit, kendaraan dinas sebanyak 10 unit, dan ruang rapat sebanyak 2 unit yang dapat menampung 50 sampai dengan 100 orang. Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan juga memiliki 7 (tujuh) gedung UPTD yang berada di Kecamatan Cipanas, Mande, Bojongpicung, Cidaun, Sukanagara, Cianjur dan Agrabinta. Sejak Tahun 2018 ada penambahan 1 gedung UPTD Pengembangan Ternak Ruminansia Cianjur.

Data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan. Berbagai sumber data dan informasi telah digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan daerah, diantaranya :

- a. Unit Kerja pada tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- b. Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi;
- c. Masyarakat yang dilakukan melalui dialog publik;
- d. Media elektronik dan media cetak.

Beberapa hal yang menjadi persoalan berkaitan dengan konsistensi ketersediaan data dan informasi, diantaranya: (1) Belum tersedianya data base yang riil sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan; (2) Tingkat pemahaman petugas pendata masih minim; (3) Belum tersedianya dana operasional yang memadai; (4) Mekanisme pertukaran data antar OPD maupun antar tingkatan pemerintahan belum optimal; (5) Belum semua sumber data menggunakan prosedur pengumpulan data menurut standar baku (konsep, definisi, metodologi), sehingga data yang dihasilkan diragukan akurasinya; (6) Data yang diperlukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum terkoordinasikan dengan baik pada sebuah perangkat formal (unit pengelola data); (7) Proses penyimpanan data dan informasi belum disusun dalam sebuah sistem penelusuran yang mudah, cepat dan efektif, sehingga informasi yang tersedia tidak dapat dengan segera disajikan; dan (8) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses publikasi data.

2.2.3 Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan, jenis pelayanan sebagai berikut :

I. Bidang Perikanan Tangkap

Jf Analis Akuakultur Ahli Muda , mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data produksi penangkapan ikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Darat (PUD);
- b. Pengolahan dan analisis data produksi penangkapan ikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Darat (PUD);
- c. Pelaksanaan analisis dan pendugaan stok assessment terhadap pemanfaatan potensi sumber daya perikanan Perairan Umum Darat (PUD);
- d. Pengolahan dan pembinaan penangkapan ikan di Perairan Laut, dan di Perairan Umum Darat (PUD);
- e. Pengolahan dan pengawasan penyelenggaraan Tempat Pemasaran Ikan (TPI);

Jf Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan, mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan.
- b. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan nelayan.
- c. Pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis penguatan kelembagaan kepada nelayan, kelompok pengawas masyarakat nelayan, dan atau badan hukum yang bergerak di bidang perikanan tangkap.
- d. Pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha nelayan, promosi hasil produksi pesisir dan laut unggulan daerah.
- e. Pelaksanaan pendampingan pelatihan dan bimbingan teknis bagi nelayan.
- f. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan penilaian kelas kelompok pengawas masyarakat nelayan.
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan penertiban Tanda Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH).
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan.
- j. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jf Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan.

- b. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan pelaku usaha pembudidayaan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- c. Pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis penguatan kelembagaan kepada pembudidaya ikan, kelompok pembudidaya ikan, pengolah ikan, kelompok pemasar ikan dan/atau badan hukum yang bergerak dibidang perikanan budidaya.
- d. Pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha pembudidayaan ikan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, serta promosi produksi perikanan unggulan daerah.
- e. Pelaksanaan pendampingan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha perikanan.
- f. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan penilaian kelas kelompok usaha perikanan.
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan penertiban SIUP di bidang perikanan dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan.
- j. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jf Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Peternakan.
- b. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan pelaku usaha peternakan;
- c. Pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis penguatan kelembagaan kepada masyarakat peternak, kelompok tani ternak, dan/atau badan hukum yang bergerak dibidang peternakan.
- d. Pelaksanaan promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah.
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi dalam pengajuan kredit permodalan bagi pelaku usaha peternakan.
- f. Pelaksanaan pendampingan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha peternakan.
- g. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan penilaian kelas kelompok usaha peternakan.
- h. Pelaksanaan penertiban rekomendasi bagi ijin usaha peternakan.

- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Peternakan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Perikanan Budidaya

Jf Analis Akuakultur Ahli Muda , mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data produksi budidaya ikan air tawar, payau, laut dan perikanan non-konsumsi (ikan hias).
- b. Pengolahan dan analisis data produksi budidaya ikan air tawar, payau, laut dan perikanan non-konsumsi (ikan hias).
- c. Penyusunan bahan teknis budidaya ikan air tawar, payau, laut dan perikanan non-konsumsi (ikan hias).
- d. Penyediaan dukungan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan air tawar, payau, laut dan perikanan non-konsumsi (ikan hias).
- e. Pelaksanaan pengawasan pengeluaran dan pemasukan produksi ikan budidaya air tawar, payau, laut dan perikanan non-konsumsi (ikan hias).
- f. Pelaksanaan pembinaan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB).
- g. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan, mutu benih dan mutu calon induk ikan dan mutu induk ikan serta pelestarian calon induk, induk dan benih ikan.
- h. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan (pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan).

Jf Analis Akuakultur Ahli Muda, mempunyai fungsi pelayanan

- a. Pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data sarana dan prasarana budidaya ikan, penangkapan Ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI), penangkapan ikan di Perairan Laut dan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD).
- b. Pengolahan dan analisis data budidaya ikan, penangkapan ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Penangkapan ikan di Perairan Laut dan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD).
- c. Pengolahan data statistik perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- d. Pelaksanaan fasilitas sarana dan frasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

- e. Pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan serta pengelolaan lingkungan usaha perikanan.
- f. Pelaksanaan pengelolaan zonasi lahan dan perairan untuk budidaya perikanan.
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- h. Pelaksanaan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

II. Bidang Peternakan

- a. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan, produksi peternakan, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- b. Penyusunan pedoman teknis operasional penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan, produksi peternakan, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- c. Penyiapan dan penyajian data/informasi mengenai potensi serta permasalahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan peningkatan produksi ternak.
- f. Pelaksanaan pengawasan penyediaan, peredaran dan mutu bibit ternak, pakan olahan dan hijauan pakan ternak.
- g. Pelaksanaan fasilitas penelusuran, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan tidak menular.
- h. Pelaksanaan fasilitas pengawasan dan rekomendasi pemasukan, pengeluaran dan peredaran hewan dan produk hewan.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan, hasil produk asal hewan dan alat kesehatan hewan.
- j. Pelaksanaan fasilitas rekomendasi pelayanan perizinan rumah potong hewan, unit pelayanan medik veteriner, pasar hewan dan pengecer obat hewan.
- k. Pelaksanaan rekomendasi nomor kontrol veteriner, instalasi karantina hewan sementara dan instalasi karantina produk hewan sementara.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan pelayanan medik veteriner dan laboratorium.

- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jf Pengawas alat dan mesin pertanian ahli muda, mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan serta data statistik peternakan.
- b. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana prasarana peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.
- c. Pelaksanaan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.
- d. Pelaksanaan pengembangan lahan penggembalaan umum, dan pengelolaan wilayah sumber bibit rumpun / galur ternak.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah peternakan.
- f. Pelaksanaan perumusan sistem, pola pengembangan, dan penetapan kawasan peternakan terpadu.
- g. Penyiapan bahan bimbingan penenrapan teknologi peternakan tepat guna.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan hewan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jf Pengawas Bibit ternak ahli muda, mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan pengolahan dan analisis data populasi dan produksi peternakan.
- b. Pelaksanaan bimbingan/pembinaan teknis produksi peternakan.
- c. Pelaksanaan penetapan seleksi dasar ternak dan registrasi ternak bibit.
- d. Pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) dan plasma nutfah ternak.
- e. Pelaksanaan pengaturan sistem pengembangbiakan (*breeding system*) peternakan.

- f. Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak.
- g. Pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak.
- h. Pelaksanaan bimbingan penguatan kelembagaan kepada masyarakat peternak, kelompok tani ternak dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang peternakan.
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan pengkajian teknologi terhadap masyarakat peternak.
- j. Penyiapan bahan rekomendasi dalam pengajuan kredit permodalan bagi pelaku usaha peternakan.
- k. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan bagi pelaku usaha peternakan.
- l. Pelaksanaan pemrosesan dan/atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan di bidang usaha peternakan.

III. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Jf Medik Veteriner ahli muda , mempunyai fungsi pelayanan :

- a. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyakit hewan, data RPH, PH, TPU, data pengolah dan pedagang produk pangan asal hewan, data pelayanan medik veteriner serta data jenis obat hewan.
- b. Pelaksanaan penelusuran (*Surveilans*) penyebaran penyakit hewan menular dan tidak menular, tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan tidak menular.
- c. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan medik veteriner dan gangguan reproduksi.
- d. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan medik veteriner dan gangguan reproduksi.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di pengecer (toko, retail, *pet-shop*, *poultry-shop*) dan peternak.
- f. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi pemasukan serta pengeluaran hewan dan produk asal hewan, rekomendasi ijin usaha pemotongan hewan dan unggas, rekomendasi instalasi karantina hewan dan bahan asal hewan sementara, rekomendasi ijin unit pelayanan medik veteriner dan rekomendasi ijin obat hewan pada tingkat pengecer (toko, retail, *pet-shop*, *poultry-shop*).
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan *hygiene* sanitasi di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), tempat pengolahan produk pangan asal hewan serta pedagang produk pangan asal hewan.

- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dalam kegiatan proses produksi.
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada pelaku usaha ternak, dan pengujian bahan pangan asal hewan.
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- k. Pelaksanaan evaluasi pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan kabupaten cianjur

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis dan indikator sasaran strategis (IKU) diantaranya Sasaran Strategis: Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan. Indikator sasaran ini memberikan gambaran usaha yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam mendorong tercapainya produksi perikanan dan peternakan di Kabupaten cianjur dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Cianjur pada sektor perikanan dan peternakan indikator kinerja yang pertama ini mempunyai dua indikator sasaran (IKU) yaitu Persentase Peningkatan Hasil Tangkapan Nelayan dengan capaian sebesar 4,5 % dan Indikator kedua Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 4,5 %

Untuk indicator kinerja yang ke dua yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) indikator kinerja yang kedua ini mempunyai dua indikator sasaran (IKU) yaitu pertama Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan capaian sebesar 100 % dan indicator kedua Persentase Produk Hasil Peternakan yang layak konsumsi dengan capaian sebesar 100%

Pada tahun 2020 realisasi hasil tangkapan nelayan mencapai angka 4,51 % dari target 4,5 % atau dengan capaian 100,22 %. Realisasi ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah hasil tangkapan nelayan pada tahun 2020 dikurangi dengan jumlah hasil tangkapan ikan oleh nelayan pada tahun 2019 dibagi dengan jumlah hasil tangkapan tahun 2019. Jumlah hasil tangkapan nelayan ini pada tahun 2020 mencapai 1992 ton dari target 1779 ton atau dengan capaian 111,97%. Realisasi jumlah hasil tangkapan nelayan dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Tahun 2020 merupakan tahun keempat periode Renstra 2016 – 2021, capaian target indikator kinerja pada sasaran ini sampai dengan tahun 2020 Capaian indikator

persentase peningkatan hasil tangkapan nelayan sampai dengan tahun 2020 adalah 26,74 % dari target akhir renstra sebesar 22,5%, sehingga capaian kinerja indikator adalah sampai dengan tahun 2020 sebesar 118,84% atau sudah melampaui dari target kinerja sampai dengan periode akhir renstra.

Beberapa hal yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran ini adalah dilaksanakannya program yang mengarah terhadap capaian indikator yaitu program pengembangan sumberdaya kelautan dan masyarakat pesisir yang terdiri dari dua kegiatan yaitu :

1. Pengembangan kawasan masyarakat pesisir; kegiatan pengembangan kawasan masyarakat pesisir pada tahun 2020 memberikan bantuan untuk 20 kelompok nelayan berupa bimbingan dan pelatihan, bantuan percontohan budidaya ikan bandeng untuk 1 kelompok di Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta serta pemeliharaan tanaman vegetasi pantai di 3 kawasan yaitu di kawasan pesisir kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cidaun.
2. Kegiatan pengembangan perikanan tangkap; kegiatan ini memberikan bantuan sarana penangkapan ikan berupa pemberian alat tangkap kepada 5 Kelompok nelayan laut dan restocking untuk 8 kelompok nelayan perairan umum daratan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
Kabupaten Cianjur

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Capaian Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	URUSAN PILIHAN																	
2:01	KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
1	Cakupan pelayanan Kesehatan Hewan (%)		jumlah hewan yang dilayani di bagi jumlah hean yang ada di bagi 100 persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Produksi Hasil Peternakan (ton)		jumlah Produksi hasil peternakan	78.282	82.111	86.303	90.644	95.190	80.565	84.279	86.510	112.352	125.781	103	103	100	124	132.137
	Produksi Daging (Ton)		Jumlah Produksi Daging	50.279	53.203	56.471	59.821	63.352	51.077	54.506	56.650	66.274	64.686	102	102	100	111	102,10
	Produksi Telur (Ton)		Jumlah Produksi Telur	22.157	23.044	23.966	24.924	25.921	23.653	23.910	23.980	40.586	55,313	107	104	100	163	213.39
	Produksi Susu (Ton)		Jumlah Produksi Susu	5.846	5.864	5.881	5.899	5.917	5.835	5.863	5.880	5.492	5.782	100	100	100	93	97.71

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

	Populasi Ternak (Ekor)		Jumlah populasi ternak	15.659.968	16.276.758	16.919.402	17.589.050	18.286.891	15.052.997	15.739.490	16.920.300	20.308.822	20.348.086	96	97	100	115	111
	Persentase Kelahiran Ternak Hasil IB (%)		jumlah ternak hasil IB di bagi jumlah ternak yang ada dikali 100 persen	60	62	64	66	68	60	62	62	62	68	100	100	96,88	93,93939	60
	Persentase Kelompok Peternakan yang Dibina (%)		jumlah kelompok yang dibina dibagi jumlah kelompok yang ada di kali 100 persen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
	Volume Produk Olahan Hasil Peternakan (ton)		Jumlah Produk olahan hasil peternakan	400	450	500	550	600	430	455	505	555	600	107,5	101,11111	101	100,9091	100
	Persentase kelompok nelayan yang dibina (%)		jumlah kelompok yang ada dibagi jumlah kelompok yang dibina	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
	Hasil Tangkapan dalam Setiap Upaya Penangkapan (Ton)		Jumlah hasil tangkapan ikan	1.559	1.629	1.703	1.779	1.859	1.637	1.821	1.745	1.992	1.906	105	112	102,466	111,973	102,528
	Persentase kelompok pembudidaya yang dibina (%)		Jumlah kelompok yang ada dibagi kelompok pembudidaya yang ada	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	143.380	149.832	156.575	138.503	110.682	119.450	131.908	118.070	130.025	134.743	83	88,037268	75,408	93,87883	121,73

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

	Produksi Benih Ikan (Juta Ekor)		Jumlah Produksi Benih ikan	11.024.000	11.240.000	11.470.000	11.700.000	11.932.000	12.570.000	11.024.000	11.415.000	11.800.000	11.932.000	114	98,078292	99.5205	100,8547	100
	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)		Jumlah Produk olahan hasil perikanan	1.381	1.408	1.436	1.465	1.494	1.393	1.430	1.465	1.470	1.514	101	101,5625	102,019	100,3413	101,318

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Capaian (%)					Rata-rata Pertumbuhan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target Anggaran	Realisasi	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
1.1	Urusan Pilihan Peternakan																					
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	N/A	Rp 2.866.371	Rp 16.779.600	Rp 4.453.300	Rp 3.030.742		N/A	Rp 2.835.653	Rp 15.889.189	Rp 4.161.161	Rp 3.010.572		N/A	99	95	93	99				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						Rp 1.488.870.910						Rp 147.361.367.100							9898		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian						Rp 1.127.215.300						Rp 1.122.913.777							100		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						Rp 188.414.910						Rp 187.729.800							100		
	Program Penyuluhan Pertanian						Rp 171.614.960						Rp 165.297.627							96		

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

1.2	Urusan Pilihan kelautan dan perikanan																					
	Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir	N/A	Rp 1.146.155,00	Rp 888.421,00	Rp 539.200,00	Rp 365.209,00		N/A	Rp 1.017.809,00	Rp 851.030,00	Rp 510.665,00	Rp 2.050.684,00		N/A	88,8	95,79	94,71	100				
	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	N/A	Rp 2.030.054,00	Rp 1.646.340,00	Rp 1.692.856,00	Rp 2.122.244,00		N/A	Rp 1.896.221,00	Rp 1.581.783,00	Rp1.632.968,00	Rp 2.050.684,00		N/A	93,407	96,1	96,46	97				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						Rp1.225.212.359						Rp1.222.355.949								99,77	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						Rp 215.624.200						Rp215.212.250									99,81
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						Rp 1.064.881.450						Rp1.031.149.660									96,83

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur

2.4.1 Tantangan Pembangunan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Pembangunan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan sering mengalami permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangannya dan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan serta para pelaku usaha dibidang perikanan dan peternakan. Tantangan ini dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak dan berat untuk diselesaikan jika tanpa adanya kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, akademisi, swasta/pelaku usaha, masyarakat. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat pun sangat penting bagi pembangunan yang lebih menyeluruh (*holistic*), terintegrasi, dan terarah.

Tantangan-tantangan pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

1. Belum terdapatnya rencana zonasi wilayah pesisir di wilayah selatan Kabupaten Cianjur dalam rangka mendukung implementasi rencana pengelolaan pembangunan wilayah pesisir.
2. Masih kurangnya akselerasi pembangunan sarana dan prasarana bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
3. Masih kurangnya peran Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan dalam memfasilitasi nelayan kecil dan masyarakat pesisir saat musim paceklik ikan.
4. Belum berkembangnya sarana dan prasarana penunjang produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil pengembangan perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produksi perikanan di daerah dan pemenuhan konsumsi lokal.
5. Terbatasnya sumber daya manusia, baik pada petugas dinas maupun pelaku usaha perikanan, dalam kuantitas dan kualitas. Keterampilan teknis yang masih terbatas dan kurang tersosialisasikannya teknologi tepat guna dalam bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia.
6. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan dalam produksi dan pemasaran hasil produksi.
7. Para pelaku usaha kelautan dan perikanan memiliki kelemahan dalam memanfaatkan akses permodalan.

Sedangkan tantangan pada pembangunan dibidang peternakan dan kesehatan hewan, sebagai berikut:

1. Wilayah Kabupaten Cianjur dengan luas 350.148 hektar atau 3.840 km², hanya memiliki 3 (tiga) unit Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan status Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (UPTD), dimana 2 (dua) unit Puskesmas melayani 10 (sepuluh) kecamatan, sedangkan 1 (satu) unit Puskesmas melayani 12 (dua belas) kecamatan
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan dengan kualifikasi yang dibutuhkan, baik pendidikan formal seperti dokter hewan, sarjana peternakan, dan pendidikan yang terkait, maupun pendidikan non formal seperti pelatihan keterampilan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 3. Terdapatnya tempat pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah, sehingga tidak terpantaunya proses pemotongan hewan dan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang menjamin bahwa daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi.
 4. Masih adanya gangguan penyakit hewan yang menyebabkan terhambatnya pencapaian produksi peternakan, dengan penyakit yang dominan yaitu brucellosis dan cacangan pada sapi, scabies pada domba, serta *avian influenza* (AI) dan *newcastle disease* (ND) pada unggas.
 5. Kurangnya daya dukung lahan untuk penanaman hijauan pakan ternak.
 6. Belum tersedianya sentra wilayah bibit ternak, terutama ternak ruminansia di Kabupaten Cianjur.

2.4.2 Peluang Pembangunan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan

Pembangunan di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan di Kabupaten Cianjur memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Hal ini didukung dengan kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat cianjur yang masih cenderung agraris. Lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Cianjur adalah sektor pertanian sebesar 62,99 persen dan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB pada tahun 2019, yaitu sebesar 34,44 persen. Kontribusi PDRB dari sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan peternakan, perburuan dan jasa pertanian sebesar 31,98 persen,

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Cianjur Bagian Utara, terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 meter dengan kombinasi pegunungan, perkebunan dan pesawahan.
2. Cianjur Bagian Tengah, merupakan daerah yang berbukit-bukit kecil.
3. Cianjur Bagian Selatan, merupakan dataran rendah diselingi bukit-bukit kecil dan pegunungan yang melebar.

Posisi Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di sebelah utara, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut di sebelah timur, Kabupaten Sukabumi di sebelah barat, dan Samudera Indonesia di sebelah selatan menjadi keuntungan tersendiri,

karena Kabupaten Cianjur berada di jalur perlintasan dan penghubung antar daerah sehingga dapat mendukung iklim investasi apabila dikelola dengan optimal.

Lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengairan tanaman pertanian. Sungai terpanjang di Cianjur adalah Sungai Cibuni, yang bermuara di Samudera Indonesia.

Dari luas wilayah sebesar 350.148 hektar, pemanfaatan lahan di Kabupaten Cianjur meliputi 83.034 hektar (23,71 persen) berupa hutan produktif dan konservasi, 58.101 hektar (16,59 persen) berupa tanah pertanian lahan basah, 97.227 hektar (27,76 persen) berupa lahan pertanian kering dan tegalan, 57.735 hektar (16,49 persen) berupa tanah perkebunan, 3.500 hektar (0,10 persen) berupa tanah dan penggembalaan/pekarangan, 1.239 hektar (0,035 persen) berupa tambak/ kolam, 25.261 hektar (7,20 persen) berupa pemukiman/pekarangan, dan 22.483 hektar (6,42 persen) berupa penggunaan lainnya.

Potensi agribisnis/agromarinebisnis yang dimiliki Kabupaten Cianjur cukup besar. Setelah komoditi padi sawah, komoditas pada sub sektor peternakan dan perikanan merupakan komoditas yang menjadi unggulan pada sektor pertanian di Kabupaten Cianjur, diantaranya sapi potong, domba, ayam ras, ikan mas, ikan nila, ikan lele, lobster, dan tuna. Hal ini terlihat dari kemampuan komoditas tersebut menjadi sektor basis pada beberapa kecamatan.

Kekayaan alam dan budaya yang lengkap serta posisi geografis yang menguntungkan, Kabupaten Cianjur memiliki prospek yang cukup potensial dalam pariwisatanya, terutama wisata agro. Wisata agro ini diharapkan turut serta mendorong perekonomian masyarakat sekitar dan juga mendorong pelaku usaha peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produksinya, bukan hanya dalam kuantitas, tapi juga kualitasnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Cianjur selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yang akan menjadi dasar penyusunan rencana strategis dinas dalam menentukan target dan capaian kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat D aerah

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Produksi Hasil Perikanan	Rendahnya Produksi Perikanan Tangkap Laut	Sarana dan prasarana alat tangkap masih dibawah 5 GT
		Belum Optimalnya Produksi Perikanan Budidaya di Masyarakat	Terbatasnya modal yang dimiliki oleh masyarakat
		Belum Optimalnya Produksi Benih Ikan yang berkualitas di masyarakat	Masih rendahnya ketersediaan indukan unggul di masyarakat
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir	
2	Produksi Hasil Peternakan dan Populasi ternak	Masih rendahnya produktivitas ternak yang dimiliki oleh masyarakat	Modal yang dimiliki oleh peternak terbatas

		Masih adanya kekhawatiran dari masyarakat tentang jaminan keamanan produk pangan asal hewan dan ikan	Penerapan Cara budidaya ternak yang baik dimasyarakat masih rendah
		Masih merebaknya kasus penyakit hewan menular, seperti kasus <i>Brucellosis</i> , <i>Rabies</i> , <i>Avian Influenza (AI)</i> .	Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan hewan masih terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang dituangkan dalam strategi pembangunan pembangunan jangka menengah daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah Kabupaten Cianjur berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025. Kajian arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah berupa tahapan pembangunan berdasarkan skala prioritas atau proses pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD ditujukan untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan relevansinya dengan rencana jangka menengah daerah yang akan disusun.

RPJM Daerah 2021-2026 penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sehubungan dengan hal di atas, maka visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 adalah :

“CIANJUR MANJUR (MANDIRI, MAJU, RELIGIUS) BERAKHLAK MULIA”

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Cianjur dibangun untuk menunjukkan cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Cianjur dan para stakeholder pembangunan yang ada di Kabupaten Cianjur.

Dasar dari perumusan visi ini adalah masih banyaknya permasalahan pembangunan yang masih harus ditangani di Kabupaten Cianjur. Salah satunya adalah Indeks pembangunan manusia (IPM)/*human development index* yang selama ini dijadikan parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah, posisinya sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 65,36 poin. Selain itu, sektor pendidikan, sektor kesehatan serta kemampuan daya beli (*purchasing power*) masyarakat yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Sektor infrastruktur juga harus menjadi fokus perhatian Kabupaten Cianjur hari ini dan ke depan, dimana infrastruktur yang lengkap dan berkualitas akan memberikan stimulus atas aktivitas masyarakat yang kreatif dan berkualitas baik dari sisi jasmani maupun rohani.

Masa sekarang disebut dengan masa kehidupan digital. Era Industri 4.0 yang sering diidentikkan dengan era kelimpahan data - *big data*, era *internet of things*, era “*artificial intelligence*”, robotisasi, tentu dengan segala implikasinya terhadap aspek kehidupan merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam membangun Cianjur ke depan. Pada saat yang bersamaan pada tahun dokumen ini dibuat, masih pada situasi Pandemi Covid-19 yang belum diketahui secara pasti kapan akan berakhir, sehingga menjadi tantangan lain bagi masyarakat Kabupaten Cianjur dan dituntut untuk bisa melakukan adaptasi kehidupan baru (AKB).

Visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD tahun 2021-2026
memiliki makna filosofis seperti

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Cianjur Manjur Berakhlak Mulia	Manjur	Memiliki makna : ampuh, kuat, mempan, berpengaruh, berhasil, meyakinkan, mustajab dan mujarab. Manjur merupakan singkatan dari MANDIRI -MAJU-RELIGIUS
	Mandiri	Memiliki makna berdiri sendiri
	Maju	Mengandung makna berada pada tingkat peradaban yang tinggi
	Religius	Memiliki makna sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Akhlak Mulia	Merupakan barometer yang akan menentukan baik buruknya seseorang, baik buruknya sebuah masyarakat. Akhlak manusia terhadap Tuhan yang dimanifestasikan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan, akhlak manusia terhadap sesama (akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, sampai akhlak beragama), serta akhlak manusia terhadap lingkungan alam di luar manusia (hidup harmoni dengan lingkungan alam), adalah tiga cakupan penting yang akan menjadi sasaran penting dalam pembangunan akhlak ini.

Dari semua uraian di atas, maka untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut *era society 5.0*;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi ;
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup;

5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik profesional, efektif dan efisien serta adatif menuju era Governance 3.0

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan secara vertikal berada dibawah 2 kementerian dan 2 dinas provinsi, yaitu Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat untuk urusan pertanian (subsektor peternakan), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kelautan dan perikanan.

3.3.1 Visi dan Misi Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat

VISI : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi (Nilai Religius, Nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan inovatif

MISI :

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan public yang inovatif.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, meliputi

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Untuk meneyeleggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
 - o Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi.
 - o Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi.
 - o Penyelenggaraan administrasi Dinas.
 - o Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - o Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3.2 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

MISI :

Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat termasuk dalam Misi Keempat Jawa Barat, yaitu **meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan**, yaitu dengan nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara dan wirausaha juara.

TUGAS POKOK :

Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian, sub urusan peternakan, meliputi ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan

dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

FUNGSI :

Dinas mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian, sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan ketahanan pangan dan pertanian, sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

3.3.3.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan.
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
 - a. Optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu optimalnya konservasi dan keanekaragaman hayati.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan Meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

3.3.3.2 Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 – 2024

pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Misi Pertanian Tahun 2020 – 2024

- Mewujudkan ketahanan pangan, Mewujudkan ketahanan pangan
- Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
4. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
5. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
6. Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
7. Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;

8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, pada Pasal 25 telah ditentukan rencana pola ruang wilayah, yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola kawasan budidaya yang akan diselaraskan dengan rencana pengembangan potensi kelautan, perikanan dan peternakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan, yaitu kawasan peruntukan peternakan dan kawasan peruntukan perikanan. Kawasan peruntukan peternakan diatur lebih lanjut pada Pasal 33, dimana kawasan tersebut diarahkan untuk peternakan unggas, non unggas dan hewan ternak besar, meliputi:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Kecamatan Pacet | i. Kecamatan Cibeber |
| b. Kecamatan Cipanas | j. Kecamatan Campaka |
| c. Kecamatan Cugenang | k. Kecamatan Campakamulya |
| d. Kecamatan Sukaresmi | l. Kecamatan Sukanagara |
| e. Kecamatan Cikalongkulon | m. Kecamatan Takokak |
| f. Kecamatan Mande | n. Kecamatan Pagelaran |
| g. Kecamatan Sukaluyu | o. Kecamatan Tanggeung |
| h. Kecamatan Haurwangi | p. Kecamatan Cibinong |
| q. Kecamatan Ciranjang | u. Kecamatan Kadupandak |
| r. Kecamatan Gekbrong | v. Kecamatan Leles |
| s. Kecamatan Warungkondang | w. Kecamatan Agrabinta |
| t. Kecamatan Cilaku | x. Kecamatan Sindangbarang |

Sedangkan untuk kawasan peruntukan perikanan diatur lebih lanjut pada Pasal 37, dimana kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan sarana dan prasarana peruntukan budidaya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kawasan Peruntukan Perikanan
Berdasarkan RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031

Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Sarana dan Prasarana Peruntukan Perikanan
a. Kecamatan Agrabinta	a. Kolam air tawar di setiap kecamatan dengan potensi seluas kurang lebih 1.751 hektar	a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Sindangbarang
b. Kecamatan Sindangbarang	b. Kolam air payau/ tambak di Kecamatan Sindangbarang dan Cidaun dengan potensi seluas kurang lebih 21 hektar	b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi: TPI Jayanti di Kecamatan Cidaun; TPI Apra di Kecamatan Sindangbarang; TPI Cikakap di Kecamatan Agrabinta
c. Kecamatan Cidaun	c. Kolam jaring apung di kawasan Waduk Cirata Ciranjang dengan potensi seluas kurang lebih 2.932 hektar, meliputi: 1. Kecamatan Mande; 2. Kecamatan Cikalongku lon; 3. Kecamatan Ciranjang.	c. Pusat Benih Ikan di Kecamatan Karangtengah
		d. Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bojongpicung
		e. Unit Pembenihan Rakyat dengan potensi seluas kurang lebih 283 hektar, meliputi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Sukaluyu; 3. Kecamatan Ciranjang; 4. Kecamatan Mande; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cilaku; 7. Kecamatan Cugenang.

1. Optimalisasi pemasaran produksi peternakan;
2. Pengembangan sentra koleksi dan distribusi peternakan;
3. Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang peternakan;
4. Pemanfaatan bibit unggul perikanan;
5. Pengembangan perikanan tangkap;
6. Pengaturan dan pengendalian budidaya perikanan perairan waduk/danau;
7. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan;
8. Optimalisasi pemasaran produksi perikanan;

9. Pengembangan sentra koleksi dan distribusi perikanan; Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan.

Rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan dalam menyusun program kegiatan serta lokasi kegiatan selama periode 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2021-2026, berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta menyinergikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cianjur 2021-2026.

KLHS merupakan pelaksanaan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Telaahan KLHS mengidentifikasi intensitas keterkaitan kebijakan, rencana dan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 dengan isu strategis yang telah teridentifikasi, yakni pemanfaatan ruang, kedekatan dengan wilayah Bopunjur, konversi lahan pertanian produktif, penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan, peningkatan volume limbah domestik, penambahan jumlah penduduk, kerentanan bencana, serta pesisir dan pantai. Pada setiap keterkaitan kebijakan dan rencana pembangunan, pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir serta pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata selalu menjadi isu strategis.

Telaah terhadap rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dan kajian lingkungan hidup strategis, dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Belum sinerginya pelayanan karena masih lemahnya koordinasi antar instansi;
2. Masih kurangnya tenaga teknis peternakan dan perikanan;
3. Semakin terbatasnya lahan untuk bidang peternakan terutama untuk wilayah utara.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah tentang penataan kawasan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan, perikanan, dan peternakan;
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mengembangkan usaha peternakan;

- Adanya kebutuhan masyarakat peternakan dan perikanan akan jasa pelayanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan

Berdasarkan telaah yang dilakukan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan menyusun rencana program dan kegiatan selama periode tahun 2021-2026 untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program prioritas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan yang selaras dengan RTRW dan KLHS. Pengembangan peternakan diprioritaskan pada ternak sapi potong dan kerbau yang termasuk ternak besar, dengan wilayah pengembangan di wilayah Cianjur selatan, yaitu Kecamatan Cidaun, Agrabinta, Sindangbarang, Leles dan Cibinong. Sedangkan ternak unggas akan tetap dikembangkan di seluruh wilayah Cianjur, untuk memenuhi kebutuhan daging unggas di Kabupaten Cianjur dan wilayah sekitar yang cenderung meningkat dengan meningkatnya populasi penduduk. Pengembangan peternakan didukung dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yaitu Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Cipanas, Puskesmas Sukanagara, Puskesmas Agrabinta, Rumah Potong Hewan (RPH) Cianjur, serta instalasi dinas Balai Perbibitan Ternak di Kecamatan Sindangbarang. Wilayah pengembangan peternakan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Wilayah Pengembangan Peternakan
Berdasarkan Komoditas Ternak di Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

Komoditas Ternak	Wilayah Pengembangan (Kecamatan)	Komoditas Ternak	Wilayah Pengembangan (Kecamatan)
1. Sapi Potong	Cidaun, Agrabinta, Sindangbarang, Leles dan Cibinong	6 Ayam Buras	Seluruh Kecamatan
2. Sapi Perah	Sukanagara, Campaka	7 Ayam Ras Pedaging	Wilayah Cianjur Utara dan Tengah
3. Kerbau	Cikadu, Cibinong, Campaka, Cikalongkulon, Mande	8 Ayam Ras Petelur	Wilayah Cianjur Utara dan Tengah
4. Domba	Seluruh Kecamatan	9 Itik	Seluruh Kecamatan
5. Kambing	Seluruh Kecamatan		

Pada bidang kelautan dan perikanan, komoditas perikanan budidaya yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan adalah ikan sidat dan udang vannamei di wilayah Cianjur selatan, yaitu Kecamatan Sindangbarang, Cidaun, dan Agrabinta. Komoditas ikan hias tetap dilanjutkan untuk dikembangkan di wilayah Cianjur utara mengingat Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan memiliki instalasi dinas di Kecamatan Cugenang yang berfokus pada komoditas ikan hias, yaitu Pusat Promosi Ikan Hias (PPIH), selain itu komoditas ikan konsumsi seperti ikan mas dan ikan nila tetap menjadi komoditas unggulan untuk budidaya ikan air tawar, terutama pembenihan dan pembesaran di kolam jaring apung dengan didukung UPTD yang menangani perbenihan, yaitu Balai Benih Ikan (BBI) Jati di Kecamatan Bojongpicung dan UPTD yang menangani perairan umum, yaitu Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum (BP3U) Cirata di Kecamatan Mande. Sedangkan, kawasan perikanan tangkap terdapat pada kawasan pesisir dan laut, meliputi Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Cidaun. Pengembangan perikanan tangkap didukung UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun dan Tempat Pelelangan/Pemasaran Ikan (TPI) di Kecamatan Cidaun, Sindangbarang, dan Cidaun.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan prioritas nasional dan provinsi sebagai isu strategis pembangunan, dengan ini disampaikan **isu strategis** yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanian (peternakan) dan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang meliputi:

1. Masih belum optimalnya produksi perikanan (tangkap dan budidaya);
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
3. Masih belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas peternakan;
4. Masih munculnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis
5. Menurunnya capaian produksi perikanan budidaya sebesar 5,91%, hal tersebut didasari oleh beberapa permasalahan diantaranya yaitu:
 - a. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana / Fasilitas dan Infrastruktur.
 - b. Rendahnya adaptasi teknologi baru di bidang budidaya perikanan.
 - c. Masih rendahnya akses permodalan bagi pembudidaya ikan.

- d. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Aksi Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.
 - e. Alih fungsi lahan sawah dan lahan darat menjadi kawasan industri dan permukiman.
6. Menurunnya capaian produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 5,77%, hal tersebut didasari oleh beberapa permasalahan diantaranya yaitu:
- a. Belum optimalnya peran kelompok nelayan.
 - b. Belum adanya regulasi/kebijakan untuk pemberdayaan nelayan dan pengelolaan perikanan tangkap.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi yang dicanangkan oleh Bupati Cianjur terpilih pada periode 2021–2026, yaitu **CIANJUR MANJUR (MANDIRI, MAJU, RELIGIUS) BERAKHLAK MULIA**. Visi tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak (*driving force*) semua elemen di Kabupaten Cianjur, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membentuk masyarakat berbudi luhur yang mengamalkan nilai-nilai keagamaan.

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari elemen pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan dan urusan pemerintah bidang pertanian (peternakan) ikut berperan dalam memberikan pelayanan publik secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan, untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Cianjur melalui misi kedua, yaitu **Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan era industri 4.0 dan**, dan misi ke empat yaitu **Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup** meskipun keadaan dan ketersediaan sumberdaya yang ada sangat terbatas. Pernyataan misi di atas mengandung makna bahwa untuk periode tahun 2021–2026, Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan kabupaten cianjur akan berupaya untuk:

1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat dalam mendorong tumbuh kembangnya pembangunan kelautan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Cianjur, dan
2. Meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka pencapaian target peningkatan produksi peternakan dan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Cianjur.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan sebagai gambaran keadaan yang diinginkan merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur, menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu “*Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewani*” dan “*Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan yang berkelanjutan*”

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 2021–2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan; dan

2. Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan.

Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2022-2026 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun IKU tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas peternakan, kesehatan hewan dan perikanan

Tujuan/IK Tujuan dan Target			Sasaran/IK sasaran dan Target									
Misi RPJMD	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja sasaran PD	Kondisi Awal 2021	Target						Kondisi
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan era industri 4.0	Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewani	Nilai Konsumsi ikan	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)	N/A	107.275	107.275	110.483	113808	117.222	120.739	120.739
		Nilai Konsumsi daging		Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton)	N/A	116.186	116.186	119.672	123.262	126.960	130.768	130.768
Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup	Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan yang berkelanjutan	Jumlah Pemanfaatan lahan untuk perikanan dan peternakan (Ha)	Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan	Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan (Ha)	N/A	0	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur, menyusun strategi dan kebijakan dengan mengacu pada strategi dan kebijakan daerah dan faktor kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.

Pembangunan Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan di Kabupaten Cianjur dipengaruhi berbagai faktor, seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana pendukung, kelembagaan serta faktor politis berupa arahan kebijakan pembangunan kelautan, perikanan, dan peternakan pada pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Cianjur.

Arahan kebijakan tersebut menentukan pola, bentuk, dan mekanisme pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan peternakan, ketersediaan dukungan prasarana dan sarana pendukung kegiatan dan pengelolaan kelautan, perikanan, dan peternakan dan berbagai aspek tak terduga yang terkait langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) pelaku usaha bidang kelautan, perikanan, dan peternakan;
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan sumberdaya alam;
3. Mengembangkan wilayah berdasarkan komoditas unggulan;
4. Mengembangkan kawasan sentra ternak dan ikan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas/mutu genetik bibit lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan bibit unggul;
6. Meningkatkan sistem pemantauan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan yang bersifat zoonosis dengan prioritas pada upaya membebaskan cianjur dari penyakit hewan menular strategis *Rabies*, dan penyakit parasiter ikan dan ternak lainnya;
7. Meningkatkan peran kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan peternak untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; dan

8.Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang Perikanan dan Peternakan

5.2 Kebijakan

Kebijakan pembangunan Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan di Kabupaten Cianjur, didasari oleh visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan potensi daerah serta harus dikelola dan didayagunakan untuk sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pemanfaatannya. Pembangunan Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan di Kabupaten Cianjur akan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya yang ada dan tersedia.

Peningkatan pengelolaan pada sektor perikanan dan kelautan diprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sedangkan peningkatan pengelolaan pada sektor peternakan diprioritaskan pada peningkatan populasi ternak dan produksi hasil ternak untuk mendukung ketersediaan pangan hewan yang cukup dan berkualitas.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung sasaran daerah yaitu meningkatnya PDRB Sektor Pertanian serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan arah kebijakan berupa peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan kesehatan ternak serta meningkatkan pengelolaan dan pengembangan luasan lahan Organik.

Sedangkan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan untuk mendukung sasaran daerah meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata dan arah kebijakan berupa penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha, dan jaringan pemasaran. Kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan populasi ternak melalui teknologi inseminasi buatan;
2. Penguatan kapasitas sumber daya peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan;
4. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal;
5. Pemberdayaan peternakan dan daya saing.

Adapun Strategi dan kebijakan yang akan dicanangkan oleh OPD Tahun 2021-2026

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

CIANJUR MANJUR (MANDIRI, MAJU, RELIGIUS) BERAKHLAK MULIA

Misi : 2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan era industri 4.0

Misi : 4 Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya PDRB Sektor pertanian	Peningkatan Produksi sektor pertanian	1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian 2. Peningkatan produksi peikanan tangkap dan budidaya 3. Peningkatan Kesehatan Hewan
Terwujudnya pengelolaan Perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Produksi Pertanian dam Perikanan Organik	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Luasan Lahan Organik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan adalah seperangkat kegiatan pembangunan yang diatur demikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* di dalam sektor perikanan, dan peternakan secara terurut dan terukur. Didalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran, seluruh kegiatan Dinas akan berada di dalam koridor program-program pembangunan di Kabupaten Cianjur yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu kabupaten agraris di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, baik nabati maupun hewani yang berkualitas untuk menunjang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Produk pangan hewani, baik yang berasal dari ikan dan ternak, salah satunya merupakan produk pangan unggulan yang dihasilkan oleh Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan memprioritaskan program dan kegiatan pada tahun 2021-2026 untuk mendukung peningkatan produksi pangan hewani yang berasal dari ternak maupun ikan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan selama tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan dan mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi. Program tersebut terdiri dari program utama dan program pendukung/penunjang. Program utama terdiri dari :

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Program Penyuluhan Pertanian

Sedangkan program pendukung adalah program rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan untuk menunjang pelaksanaan program utama. Adapun program tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

6.2. Rencana Kegiatan

Sebagai bentuk operasonalisasi program-program yang sudah direncanakan, maka disusun kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang kelautan perikanan dan peternakan yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Cianjur. Kegiatan-kegiatan ini secara teknis juga disesuaikan dengan program pembangunan tingkat pusat dan provinsi khususnya untuk bidang kelautan perikanan dan peternakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu penyelarasan program/kegiatan antara pusat dan daerah ini juga bertujuan untuk mendapat dukungan anggaran pembangunan, mengingat anggaran di Kabupaten Cianjur masih terbatas.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan untuk Renstra tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Utama

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

B. Program Pendukung

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.3 Pendanaan Indikatif

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *money follow program*, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD II Kabupaten Cianjur, APBD I Provinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan dan Kedaulatan Pangan serta dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Teknis (Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian).

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan ... (Nama SKPD) ...
Kabupaten Cianjur

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	IK Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi Kinerja				Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja/Bidang Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterang an Sub Kegiatan (20)	
						2022		2023		2024		2025		2026		K			Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (PETERNAKAN)																			
1	1. Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewani	1.1 Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan		1.1.1 Nilai Konsumsi ikan			5.061.261.978		5.255.713.080	27,60	5.134.000.000	27,65	5.648.000.000	27,7	6.250.830.000	82,95	27.349.805.058	DPKHP	
				1.1.2 Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)	126.973	5.061.261.978	130.232	5.255.713.080	113.808	5.134.000.000	117.222	5.648.000.000	120.739	6.250.830.000	608.974	27.349.805.058	DPKHP		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan (Ton)	1.906	2.083	1.775.818.000	2.145	384.602.450	2.210	1.090.000.000	2.276	1.200.000.000	2.344	1.358.330.000	2.344	5.500.818.000	DPKHP	
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Yang terlindungi (Orang)	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Kecamatan)	1.906	5	1.076.046.240	5	192.414.600	8	540.000.000	8	600.000.000	8	719.000.000	8	3.127.460.840		
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Laut (Kelompok)		5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
		Jumlah Sarana Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Perairan Umum Daratan (PUD) (Kelompok)		5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)		N/A	160	211.977.200	80	192.414.600	80	240.000.000	80	250.000.000	80	319.000.000	80	1.671.404.400	JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA (Sub Koordinator Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap)	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Alat Tangkap, Perahu, Peralatan Keselamatan) (Paket)		23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA (Sub Koordinator Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap)	DAK

			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	N/A	510	864.069.040	150	291.000.000	175	300.000.000	200	350.000.000	250	400.000.000	250	1.041.000.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan di Kab.Cianjur (Orang)	100	40	192.994.400	50	192.187.850	50	550.000.000	50	600.000.000	50	639.330.000	240	2.788.413.600	BIDANG PERIKANAN TANGKAP
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	40	192.994.400	50	192.187.850	50	550.000.000	50	600.000.000	50	639.330.000	240	2.788.413.600	
2.Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan yang berkelanjutan	2.1 Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.1.1 Jumlah Pemanfaatan lahan untuk perikanan dan peternakan (Ha)	N/A	40	N/A	40	880.000.000	40	968.000.000	40	1.064.800.000	40	1.171.500.000	40	4.884.300.000	DPKHP	
			2.1.2 Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan (Ha)	N/A	40	N/A	40	880.000.000	40	968.000.000	40	1.064.800.000	40	1.171.500.000	40	4.884.300.000		
			2. Jumlah Pemanfaatan Lahan Organik untuk Perikanan (Ha)	N/A	40	1.004.224.550	40	1.505.171.260	40	968.000.000	40	1.064.800.000	40	1.171.500.000	40	4.884.300.000		
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang diberdayakan (Kelompok)	134.778	10	1.004.224.550	10	1.505.171.260	10	968.000.000	10	1.064.800.000	10	1.171.500.000	50	4.884.300.000	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelompok Pembudidaya Ikan (Kelompok)	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indikator yang ada di tahun 2021

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	N/A	43	1.004.224.550	10	1.505.171.260	10	800.000.000	10	864.800.000	10	971.500.000	83	4.534.300.000	JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA (Sub Koordinator Kenelayana n)		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	168.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	350.000.000		BANPRO V	
1. Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewan	1.1 Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Dibina (%)	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP		
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	134.778	N/A	1.562.983.000	N/A	3.142.950.020	111.598	1.892.000.000	114.946	2.081.000.000	118.395	2.289.000.000	118.395	9.544.983.000			
			Produksi Benih Ikan (Juta Ekor)	11.932.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	Indikator yang ada di tahun 2021
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Benih Ikan (Juta Ekor)	11.932.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
			Jumlah Kelompok Pengelola Pembudidaya Ikan (Kelompok)	N/A	10	2.106.220.058	10	3.142.950.020	10	1.892.000.000	10	2.081.000.000	10	2.289.000.000	50	9.544.983.000			
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	3	633.655.900	3	152.443.350	3	750.000.000	3	800.000.000	3	850.000.000	3	4.167.000.000			
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	N/A	5	1.472.564.158	5	2.990.506.670	5	1.142.000.000	5	1.281.000.000	5	1.439.000.000	5	5.377.983.000	JF ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA)	DAK	

	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.494	964	718.236.428	1.560	222.989.350	1.591	1.184.000.000	1.622	1.302.000.000	1.654	1.432.000.000	1.654	5.971.800.000	DPKHP	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.494	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	Indikator yang ada di tahun 2021
		Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	1.494	N/A	N/A	760	126.021.800	1.591	1.024.000.000	1.622	1.050.000.000	1.654	1.170.000.000	1.654	4.971.000.000		
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Perikanan yang dilaksanakan (Event)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA (Sub Koordinator Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya)	Indikator yang ada di tahun 2021
		Jumlah Kelompok Perikanan yang terbina (Kelompok)	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
		Jumlah Sarana Pengolahan Perikanan (Kelompok)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	1.494	1.530	196.914.300	760	126.021.800	1.591	384.000.000	1.622	400.000.000	1.654	450.000.000	1.654	1.218.000.000		
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	N/A	3	521.322.128	N/A	N/A	3	640.000.000	3	650.000.000	3	720.000.000	3	3.753.000.000	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA (Sub Koordinator	DAK

Kabupaten/Kota (DAK)	(Pelaku Usaha)																Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya)
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil (Rekomendasi)	N/A	N/A	N/A	4	96.967.550	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	N/A	N/A	N/A	4	96.967.550	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA (Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap)
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	160.000.000	15	252.000.000	20	262.000.000	45	1.000.800.000			BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	160.000.000	15	252.000.000	20	262.000.000	45	1.000.800.000			JF PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (PETERNAKAN)

1. Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewani	1.1 Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan	1.2.1 Nilai Konsumsi daging			2.815.914.578		4.604.065.811	2,70	4.980.050.000	2,72	5.238.555.000	2,75	5.522.921.000	8,17	23.161.506.389	DPKHP			
			1.2.2 Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton)		127.309	2.815.914.578	122.865	4.604.065.811	123.262	4.980.050.000	126.960	5.238.555.000	130.768	5.522.921.000	631.164	23.161.506.389	DPKHP		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Hasil Peternakan (Ton)	95.190	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
			Produksi Daging (Ton)	63.352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
			Produksi Telur (Ton)	25.921	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
			Produksi Susu (Ton)	5.917	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
			Populasi Ternak (Ekor)	18.286.893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
			Persentase kelompok peternakan yang mendapatkan bantuan sarana peternakan (%)	N/A	15	1.429.507.385	15	3.326.939.210	15	2.890.050.000	15	2.939.055.000	15	2.992.961.000	15	15.894.537.000	DPKHP		
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Peternakan (Ton)	95.190	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PETERNAKAN
		Produksi Daging (Ton)	63.352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PETERNAKAN	Indikator yang ada di tahun 2021	
		Produksi Telur (Ton)	25.921	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PETERNAKAN	Indikator yang ada di tahun 2021	

		Produksi Susu (Ton)	5.917	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PETERNAKAN	Indikator yang ada di tahun 2021	
		Populasi Ternak (Ekor)	18.286.893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PETERNAKAN	Indikator yang ada di tahun 2021	
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	N/A	20	1.429.507.385	20	3.326.939.210	20	2.890.050.000	20	2.939.055.000	20	2.992.961.000	100	15.894.537.000	BIDANG PETERNAKAN	
	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Ekor)	3.800	1.750	785.834.440	1.800	3.127.630.710,00	1.850	750.000.000,00	366	785.834.440,00	1.950	777.961.000,00	1.950	4.893.000.000,00	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA (Sub Koordinator Produksi Peternakan)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Ternak yang tersedia (Kelompok)	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Sub Kegiatan Penjaminan peredaran HPT, bahan pakan/pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	N/A	40	348.772.062	40	199.308.500,00	40	640.050.000,00	40	650.000.000,00	40	675.000.000,00	40	4.633.971.000,00	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA (Sub Koordinator Produksi Peternakan)	
	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi benih/bibit ternak dan HPT, Bahan pakan/pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	N/A	4	294.900.883	N/A	N/A	4	1.500.000.000,00	4	1.534.055.000,00	4	1.540.000.000,00	4	6.367.566.000,00	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA (Sub Koordinator Produksi Peternakan)	
	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pakan Konsentrat Ternak yang tersedia (Kg)	34.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021

	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	88,935	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang ber kondisi baik (%)	N/A	100	578.353.536	100	372.435.200	100	1.210.000.000	100	578.353.536	100	1.464.100.000	100	6.105.100.000		
	Persentase Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan (%)	68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Peternakan yang dikembangkan (%)	N/A	N/A	N/A	20	76.967.600	4	260.000.000	4	331.000.000	4	464.100.000	4	641.000.000	BIDANG PETERNAKAN	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	N/A	N/A	N/A	4	76.967.600	4	260.000.000	4	331.000.000	4	464.100.000	4	641.000.000		
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana peternakan yang terbangun, terrehab dan terpelihara (%)	5	20	578.353.536	3	295.467.600	3	950.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	5.464.100.000	BIDANG PETERNAKAN	
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	5	3	578.353.536	3	295.467.600	3	950.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	5.464.100.000		
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan yang tersedia (Paket)	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
	Persentase Penanganan Penyakit Hewan (%)	N/A	100	634.582.467	100	782.756.201	100	385.000.000	100	423.500.000	100	465.860.000	100	1.974.360.000		

		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG KESEHATAN HEWAN	Indikator yang ada di tahun 2021		
			Jumlah Wilayah Untuk Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan)	100	32	484.890.715	32	511.952.292	32	185.000.000	32	223.500.000	32	225.860.000	32	513.000.000			
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
			Jumlah Alat Kesehatan Hewan Yang Tersedia (Set)	400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021	
			Jumlah Obat Hewan Yang Tersedia (Botol)	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021	
			Jumlah Sampel Produk Peternakan Yang Diuji (Sample)	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021			
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	N/A	4	484.890.715	4	147.527.560	4	120.000.000	4	138.500.000	4	140.860.000	4	428.000.000	JF MEDIK VETERINER AHLI MUDA (Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan)		

Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	N/A	N/A	N/A	4	364.424.732	4	65.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	JF MEDIK VETERINER AHLI MUDA (Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan)	
Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4		4		4		4			
Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4		4		4		4			Pagu Masih Kosong di karenakan Pagu DAK
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Pelayanan labolaturium dan jasa medik veteriner yang tersedia (pelayanan)	N/A	10	149.691.752	4	148.829.829	4	100.000.000	4	100.000.000	4	120.000.000	4	1.000.000.000	BIDANG KESEHATAN HEWAN	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	N/A	4	149.691.752	4	148.829.829	4	100.000.000	4	100.000.000	4	120.000.000	4	1.000.000.000	JF MEDIK VETERINER AHLI MUDA (Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan)	
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	N/A	N/A	N/A	25	121.974.080	25	100.000.000	25	100.000.000	25	120.000.000	100	461.360.000		

		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produksi Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	N/A	N/A	N/A	4	121.974.080	4	100.000.000	4	100.000.000	4	120.000.000	4	461.360.000		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Peternakan yang Dibina (%)	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKHP	Indikator yang ada di tahun 2021
			Volume Produk Olahan Hasil Peternakan (Ton)	600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
			Persentase kelompok peternakan yang naik kelas (%)	N/A	7,93	173.471.190	8	121.935.200	8	495.000.000	8	545.000.000	8	600.000.000	8	2.599.069.000		
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Peternakan yang Dibina (%)	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BIDANG PETERNAKAN	Indikator yang ada di tahun 2021
			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Sektor Peternakan (Kegiatan)	20	10	173.471.190	1	121.935.200	1	495.000.000	1	545.000.000	1	600.000.000	1	2.599.069.000		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Event Promosi Produk Peternakan yang diikuti (Event)	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
			Jumlah Kelompok Peternakan Yang Terbina (Kelompok)	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Indikator yang ada di tahun 2021
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	N/A	10	173.471.190	10	121.935.200	10	495.000.000	10	545.000.000	10	600.000.000	5	2.599.069.000		

		Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur		100		100		100	13.000.00 0.000,00	100	13.000.00 0.000,00	100	12.970.00 0.000,00	100	38.970.00 0.000,00	DPKHP							
		Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur		100		100		100	13.000.00 0.000,00	100	13.000.00 0.000,00	100	12.970.00 0.000,00	100	38.970.00 0.000,00	DPKHP							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1. Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100	11.447.926. 624,00	100	100	10.933.893. 484,00	10.933.89 3.484,00	100	#VALUE!	100	#VALUE!	100	64.576.68 8.290,00	SEKRETARI AT							
		2. Persentase Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah		100		100				100		100		100			100	100	100	100	100		
		3. Persentase Administrasi Kepegawaian dan Umum		100		100				100		100		100			100	100	100	100	100		
		4. Presentase Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100		100				100		100		100			100	100	100	100	100		
		5. Presentase Penyediaan Jasa Penunjang		100		100				100		100		100			100	100	100	100	100		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21	284.593.600	21	289.741.180	21	289.741.1 80	21	341.058.6 40	21	341.058.6 40	21	1.602.658. 280	SEKRETARI S							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	N/A	5	53.545.500	3	49.967.600	3	49.967.60 0	3	49.967.60 0	3	49.967.600	3	253.415.90 0	JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)							
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Dokumen)		2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	N/A	N/A	N/A	1	11.943.500	1	11.943.500	1	20.000.000	1	20.000.000	1	63.887.000	JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	N/A	N/A	N/A	1	15.348.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	108.348.000	JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	N/A	2	57.105.200	1	49.967.600	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	287.072.800	JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
		Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Murni	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		2	32.148.000	1	20.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	151.148.000	JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
		Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Perubahan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian kinerja yang tersedia	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2	85.000.000	5	84.967.600	5	86.000.000	5	86.000.000	5	86.000.000	5	427.967.600	JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang tersedia	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	N/A	5	56.794.900	9	57.546.880	9	61.091.040	9	61.091.040	9	61.091.040	9	297.614.900	JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik		91,35	9.047.322.635,00	100	8.480.333.655,00		8.480.385.371,00	100	8.480.385.371	100	8.480.385.371	100	42.968.812.403,00	SEKRETARIS
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	812	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	N/A	812	8.963.668.235	812	8.388.315.635	812	8.388.315.635	812	8.388.315.635	812	8.388.315.635	812	42.516.930.775	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	N/A	1	29.590.080	1	14.315.000	1	32.549.088	1	32.549.088	1	32.549.088	1	141.552.344	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	N/A	12	35.862.200	12	44.309.900	12	39.484.060	12	39.484.060	12	39.484.060	12	198.624.280	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1												1	111.711.484	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			27.297.200,00		57.289.600,00		51.989.600,00		51.989.600,00		51.989.600,00	4	240.555.600,00	SEKRETARIS	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	N/A	N/A	N/A	2		2		2		2		2	98.640.000,00	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD yang disusun	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Tenaga Administrasi Operator BMD yang dibayar	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	N/A			2		2		2		2		2	141.915.600,00	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)	
			2	27.297.200		32.629.600		27.329.600		27.329.600		27.329.600		27.329.600			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4	269.609.934,00	4	296.130.700,00	4	202.979.520,00	4	202.979.520,00	4	202.979.520,00	4	1.174.679.194,00	SEKRETARIS	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Yang Tersedia	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/A	70		70		70		70		70		70	35.000.000	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
					41.000.000		49.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	N/A			4		4		4		4		1	500.778.060,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
			4	99.428.800		107.410.700		97.979.520		97.979.520		97.979.520		97.979.520			

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

		Jumlah Operator Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibayar	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	N/A			100		100		100		100		100	478.901.134,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
		Jumlah Pegawai yang meningkat kapasitasnya	35	65	129.181.134		139.720.000			70.000.000		70.000.000		70.000.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Umum Daerah		100	541.911.975,00	100	621.400.730,00	100	546.794.410,00	100	546.794.410,00	100	546.794.410,00	100	2.803.695.935,00	SEKRETARIS	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	N/A	1	17.551.000	1	16.150.000	1	16.940.000	1	16.940.000	1	16.940.000	1	84.521.000,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
		Tersedianya alat listrik dan penerangan Kantor	128	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Tersedianya Kertas	295	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Tersedianya Map dan Media Penyimpanan	135	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Tersedianya Tinta Untuk Cetak	130	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	N/A	1	46.082.500	1	46.696.000	1	36.486.000	1	36.486.000	1	36.486.000	1	202.236.500,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	N/A	1	25.507.575	1	32.056.000	1	30.136.660	1	30.136.660	1	30.136.660	1	147.973.555,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
		Tersedianya alat kebersihan	703	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	N/A	1	121.850.000	1	80.940.000	1	92.100.000	1	92.100.000	1	92.100.000	1	479.090.000,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

		Tersedianya Makan dan Minum Rapat (box)	2.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	N/A	1	48.486.750	1	57.050.000	1	42.186.750	1	42.186.750	1	42.186.750	36	232.097.000,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
		Jumlah dokumen penggandaan yang tersedia	36000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Spanduk yang dicetak	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	N/A	36	8.720.000	36	8.360.000	36	8.720.000	36	8.720.000	36	8.720.000	36	43.240.000,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Majalah yang tersedia	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Publikasi yang tersedia	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Surat Kabar yang tersedia	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	890	273.714.150	1000	380.148.730	1000	320.225.000	1000	320.225.000	1000	320.225.000	1000	1.614.537.880,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Yang Dilaksanakan	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	160	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	253.250.000	100	185.021.640	100	#VALUE!	100	#VALUE!	100	#VALUE!	100	#VALUE!		SEKRETARIS	

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	N/A	2	38.100.000	N/A	N/A	4	80.000.000	4	80.000.000	N/A	4	80.000.000	4	278.100.000,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	N/A	1	10.000.000	1	30.000.000,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		57	215.150.000	26	26	185.700.000	26	185.700.000	26	26	185.700.000	26	957.271.640,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)	
		Jumlah CCTV yang tersedia	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Kamera yang tersedia	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Komputer PC yang tersedia	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Laptop yang tersedia	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Printer yang tersedia	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah Scanner yang tersedia	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	845.604.800	100	693.124.126	100	845.604.800	100	845.604.800	100	845.604.800	100	845.604.800	100	4.075.543.326,00	SEKRETARIS

R.enstra Perubahan Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur 2021-2026

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	N/A	500	5.500.000	500	6.050.000	500	5.500.000	500	5.500.000	500	5.500.000	500	28.050.000,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian		
		Tersedianya Materai untuk Operasional Kantor	480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	N/A	264	219.000.000	156	100.804.226	36	219.000.000	36	219.000.000	36	219.000.000	36	976.804.226,00	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)		
		Jumlah rekening air yang dibayarkan	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Rekening Listrik Yang dibayarkan	132	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Rekening Telepon yang dibayarkan	84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	N/A	35	621.104.800	1	586.269.900	1	621.104.800	1	621.104.800	1	621.104.800	1	3.070.689.100,00	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian		
		Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah tenaga pengamanan yang diberi honor	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Tenaga Supir yang diberi honor	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100	125.745.000	100	310.851.853	100	138.330.000	100	138.330.000	100	138.330.000	100	851.586.853,00	SEKRETARIS		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	N/A	7	27.035.000	8	31.414.900	8	31.500.000	8	31.500.000	8	31.500.000	8	152.949.900,00	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)		
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Yang Terpelihara	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

		Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Yang Dibayar	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		N/A	8	23.880.000	5	27.535.100	13	28.050.000	5	28.050.000	5	28.050.000	5	135.565.100,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)	
		Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 Yang Terpelihara	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Pajak Kendaraan Operasional Roda 3 yang Dibayar	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Pajak Kendaraan Operasional Roda 4 Yang Dibayar	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	18	26.280.000	20	33.000.000	43	28.780.000	20	28.780.000	20	28.780.000	20	145.620.000,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	10	48.550.000	10	218.901.853	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	357.451.853,00	JF Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan)		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2021-2026 adalah Cianjur Manjur (Mandiri, Maju, Religius) Berakhlak Mulia. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut *era society* 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik profesional, efektif dan efisien serta adatif menuju era Governance 3.0

Perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Masa Bakti 2021-2026 Sangat ditentukan oleh Penjabaran ke tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 5 misi pembangunan Kabupaten Cianjur 2021-2026.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cianjur periode 2021-2026 disajikan pada matriks dibawah ini :

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan selama lima tahun perlu penjabaran dalam sasaran dari setiap misi. Hubungan misi, tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerja pada RPJ MD Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut *era society 5.0*

Tujuan	IK Tujuan		Sasaran		IK Sasaran
1	2		3		4
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak religius	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup
		2	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas	2	Rata-rata Lama Sekolah
				3	Angka Harapan Sekolah
		3	Menurunnya angka kemiskinan	4	persentase angka kemiskinan
		4	Menurunnya tingkat pengangguran	5	persentase tingkat pengangguran terbuka
5	Meningkatnya sumber daya manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia	6	Indeks Kesalehan Sosial		

Misi 2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal , mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0

Tujuan	IK Tujuan		Sasaran		IK Sasaran
1	2		3		4
Meningkatnya perekonomian daerah	PDRB per Kapita	1	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	1	PDRB sektor pertanian
			ADHK		

		2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	2	Pengeluaran per Kapita
		3	Meningkatnya nilai investasi	3	Persentase peningkatan nilai investasi
		4	Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
		5	Meningkatnya PDRB sektor perindustrian ADHK	5	PDRB sektor perindustrian
		6	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan ADHK	6	PDRB sektor perdagangan

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infra struktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan	IK Tujuan		Sasaran		IK Sasaran
	2		3		4
Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai	Indeks pembangunan infrastruktur daerah	1	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	1	Persentase panjang jalan kabupaten antar pusat pertumbuhan dalam kondisi baik
		2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak	2	Rasio rumah layak huni

		3	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	3	Indeks Risiko Bencana
--	--	---	--	---	-----------------------

Misi 4 : Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup

Tujuan	IK Tujuan		Sasaran		IK Sasaran
1	2		3		4
Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Udara
				2	Indeks Kualitas Air
				3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	Persentase pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok untuk masyarakat secara berkelanjutan	2	Terpenuhinya kebutuhan lahan pertanian untuk masyarakat secara berkelanjutan	1	Persentase Pemanfaatan lahan pertanian organik (<i>integrated farming</i>)

Misi 5 : Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0

Tujuan	IK Tujuan		Sasaran		IK Sasaran
1	2		3		4
Terwujudnya transformasi	Indeks Reformasi	1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	1	Nilai Evaluasi SAKIP

reformasi birokrasi yang berkualitas	Birokrasi		pemerintahan	2	Nilai Evaluasi LPPD
				3	Indeks SPBE
				4	Opini BPK
				2	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik
				1	Indeks kepuasan masyarakat

7.2. Indikator Kinerja Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, dalam menyusun rencana pembangunan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026.

Pembangunan sektor Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan periode 2021-2026 diarahkan untuk mencapai pembangunan daerah dan membantu pencapaian visi dan misi Bupati. Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur telah menentukan dua indikator kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada Misi kedua dan ke empat. Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan telah menentukan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Indikator kinerja ini dibagi kedalam dua urusan kewenangan, yaitu urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pertanian.

7.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja untuk urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan (Ton)

Produksi perikanan tangkap merupakan total hasil penangkapan ikan dalam setiap upaya penangkapan, yang berasal dari

penangkapan ikan nelayan di laut dan nelayan perairan umum daratan.

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) ;
3. Jumlah pemanfaatan lahan organik untuk Perikanan (ha);
4. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton);

Produksi olahan hasil perikanan merupakan jumlah produksi olahan hasil perikanan yang diproduksi selama 1 tahun di Kabupaten Cianjur.

Ketujuh indikator di atas semuanya masuk ke dalam indikator kinerja daerah.

7.2.2. Urusan Pertanian

Indikator kinerja untuk urusan pertanian sebagai berikut :

1. Persentase prasarana peternakan yang terpelihara;
2. Persentase kelompok peternakan yang mendapatkan bantuan sarana peternakan;
3. Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Persentase kelompok peternakan yang naik kelas

Secara garis besar kelompok peternakan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu kelompok budidaya ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau), kelompok budidaya ternak kecil (domba, kambing) ,kelompok budidaya unggas, kelompok budidaya aneka ternak, kelompok pengolah peternakan. Pembinaan kelompok peternakan ini selama periode Renstra tahun 2016-2021 ditargetkan 20 % per tahun

7.3. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Permenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU yang ditetapkan harus memiliki karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Tabel 7.2 Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
 2021-2026 Kabupaten Cianjur

NO	IKU	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton)	107.275	107.274	110.483	113808	117.222	120.739	120.739
2	Jumlah Produksi Hasil Peternakan (ton)	116.186	116.186	119.672	123262	126.960	130.768	130.768
3	Jumlah Pemanfaatan Lahan untuk Perikanan (ha)	N/A	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
2021-2026 Kabupaten Cianjur

NO	IKK	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton)	144.945	107.274	110.483	113808	117.222	120.739	120.739
2	Jumlah Produksi Hasil Peternakan (ton)	95.190	116.186	119.672	123262	126.960	130.768	130.768
3	Jumlah Pemanfaatan Lahan untuk Perikanan (ha)	N/A	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha

BAB VIII

PENUTUP

Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, dalam menyusun rencana pembangunan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2021 – 2026 merupakan arahan penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur guna mencapai sasaran-sasaran Dinas

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini sebagai self-evaluation dan upaya yang terus menerus dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan untuk mewujudkan komitmennya dalam melaksanakan akuntabilitas publik dan mengembangkan, serta menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah cukup baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Sukses tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 ini tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak dengan harapan dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Cianjur. Oleh sebab itu diperlukan komitmen, semangat, tekad, kemauan dan etos kerja yang tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan segenap aparatur Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur.

Pembangunan sektor perikanan dan peternakan periode 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai pembangunan daerah dan membantu pencapaian visi dan misi Bupati. Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur telah menentukan tujuan, sasaran indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan

Cianjur Januari 2024

Kepala
Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan
Perikanan Kabupaten Cianjur

